



Nusantara Centre—2019

# ASAL-MUASAL KEMAKMURAN

Teori dan Sejarahnya Dalam Kehidupan



Kini kemakmuran semua menjadi ilusi.  
Kemakmuran bersama menjadi mati.  
Terkubur bersama ketiadaan kesadaran diri.  
Tentu ini pekerjaan besar kita semua.  
Sebab, kemakmuran bersama itu  
cita-cita utama kita dalam bernegara!

**Judul:**

Asal-Muasal Kemakmuran

**Penulis:**

M. Yudhie Haryono

**Editor:**

Astika Wahyuaji

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Penerbit *Kalam Nusantara*

Jl. Pemuda Perum DLAP Blok F.7

Depok 16431 Jawa Barat Indonesia

Tel/Fax: +62-21-92677714/ +62-21-7773825

Hotline: +62-21-85694382784. 08118207622

Email: nusantaracom@yahoo.com

<http://www.nusantaracentre.org>

<http://www.int-journalnusantara.com>

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

All rights reserved, but:

Diperbolehkan memperbanyak demi kemerdekaan mental.

Diperbolehkan mengkopi demi kesejahteraan pengetahuan.

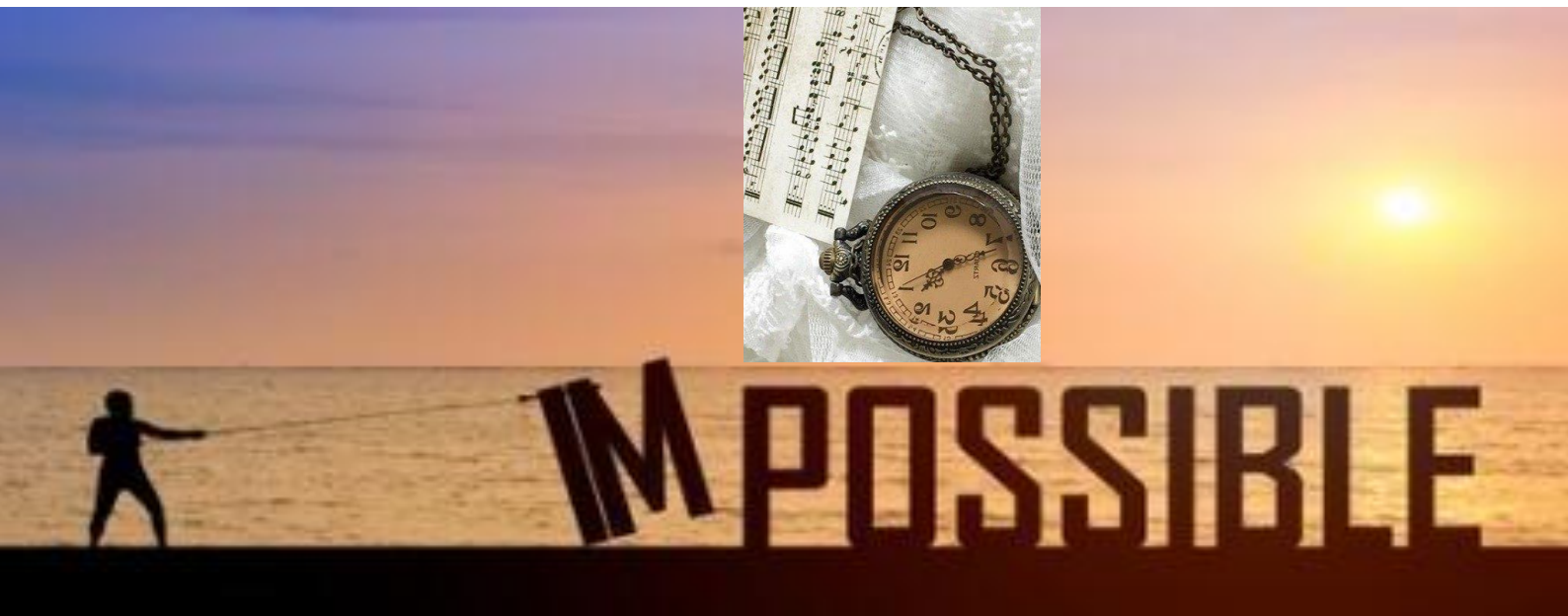
Ukuran Buku: 13X20cm

Ketebalan: 14 hlm.

ISBN: 978-60273808----- (belum didaftarkan)

Cetakan pertama: 2019

Riset ini disponsori oleh PT. Nusantara Bakti Yuda



—Lembar Persembahan—  
Buat dua pewaris peradaban:  
Syaza Farzanayu Maheswari  
Syailendra Diastik Putra Haryono



*Daftar Isi—*

5—	Pengantar
8—	Menyoal Kemakmuran
9—	Anarkhi Kemakmuran
11—	Kemakmuran Yang Hilang
13—	Konstitusi dan Kemakmuran
15—	Memakmurkan Bangsa
16—	Kanvas Kemakmuran
18—	Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat
21—	Ontologi Kemakmuran Indonesia
24—	<i>Road Map</i> Kemakmuran Kita
26—	Kemakmuran dan Pertanyaan Itu
28—	Makmurkan Jiwanya Makmurkan Badannya
30—	Tradisi Kemakmuran Kita
32—	Indeks Kebahagiaan
34—	APBN Untuk Kemakmuran
37—	Penutup
40—	Tentang Penulis

## Pengantar

\*\*\*

—*Bagaimana agama-agama purba, aku setia dengan cita-cita menaklukkan dunia. Tentu dengan kemakmuran, kejujuran, keadilan dan kerja yang jadi legenda. Kemakmuran adalah mental. Kemakmuran adalah misteri. Di kita kini, kemakmuran selalu mengundang pertanyaan, kekaguman sekaligus kebingungan—*

Tak ada manusia bercita-cita menjadi miskin. Tak ada manusia Indonesia mau dimiskinkan. Tak ada di antara kita rela hidup dalam dekapan kemiskinan. Dus, miskin, dimiskinkan dan kemiskinan adalah musuh umat manusia sedunia.

Menegaskan hal itu, bapak proklamator Mohammad Hatta (1946) berucap, “merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat dengan mengandangkan kemiskinan secara revolusioner.”

Jelas. Kebahagiaan dan kemakmuran sebagai tujuan akhir bernegara Indonesia. Apa itu kebahagiaan? Adalah keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, cinta, kepuasan dan kenikmatan secara intens.

Sedangkan kemakmuran (*prosperity*) dalam kamus *Webster's Revised Unabridged Dictionary* (February 2009) adalah keadaan yang berkembang, berkemajuan dan memiliki keberuntungan baik atau memiliki status sosial yang sukses. Kemakmuran seringkali mencakup kekayaan dan faktor-faktor lain semisal kebahagiaan, pendidikan dan kesehatan.

Dalam bernegara, kemakmuran tidak bisa berlaku individual melainkan harus bersama atau menasional. Karena itu makna kemakmuran nasional adalah: 1) Semua harta milik dan kekayaan potensi yang dimiliki negara untuk keperluan seluruh rakyat; 2) Keadaan kehidupan negara yang rakyatnya mendapat kebahagiaan jasmani dan rohani akibat terpenuhi kebutuhannya.

Cara sebuah negara agar bisa makmur, secara garis besar dan paling efektif adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber

daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah sendiri dan diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Maka dari itu tidak ada alasan bagi pemerintah untuk memberikan peluang kepada pihak asing maupun “aseng” guna mengelola atau bahkan menguasai sumber daya alam yang ada di bumi pertiwi ini. Sebab, sampai kapanpun, hal itu tidak akan mewujudkan kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Kemakmuran akan terwujud bila kekayaan alam Indonesia semuanya dikelola, dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkan oleh, dari dan untuk warga negara Indonesia.

Pengelolaan sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Dan, dalam pengelolaannya harus memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan agar sumber daya alam tidak hanya dinikmati oleh generasi sekarang, namun juga untuk pemanfaatan jangka panjang oleh generasi yang akan datang.

Pengelolaan sumber daya manusia demi kemakmuran bangsa dilakukan dengan cara meningkatkan mutu pendidikan. Tetapi, pendidikan yang dilakukan harus membentuk kepribadian, mental dan watak manusia sebagai warga negara yang baik, jujur, inovatif, solutif dan jenius.

Tentu agar tidak terjadi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang saat ini telah menjadi penyakit pejabat tinggi negara sehingga kemakmuran bangsa susah untuk dicapai. Juga agar tidak melahirkan para pengkhianat dan penjahat bagi warga dan negaranya sendiri.

Dalam sejarahnya, istilah kemakmuran mengalami beberapa perluasan. Misalnya menjadi “persemakmuran atau negara-negara persemakmuran (*commonwealth of nations*)” yang merupakan persatuan secara sukarela negara-negara berdaulat yang didirikan atau pernah dijajah oleh pihak Inggris.

Tentu banyak perkembangan isu lain dari soal kemakmuran ini. Itulah mengapa, kali ini, kami di Nusantara Centre meriset, menulis dan membukukan kajian bertema “kemakmuran,” yang nantinya dibukukan buat para pembaca dan pecinta pengetahuan. Setidaknya, tema kemakmuran ini penting karena lima hal.

*Pertama*, kemiskinan kita tak habis-habis. Rezim sudah berganti-ganti tetapi problem utama berbangsa dan bernegara tak bisa diselesaikan. Setidaknya sampai saat ini.

*Kedua*, konsep dan roadmap kemakmuran belum solid dan dijadikan model utama pengentasan kemiskinan. Bahan kita dalam bernegara tak selalu bersifat komprehensif dalam meletakkan ide dan cita-cita kemakmuran. Ia seperti ada tetapi tiada. Ia seperti tiada tetapi ada.

*Ketiga*, tak banyak agensi yang memahami teori dan konsep ini sehingga kita minim agensi dan subjek-subjek yang serius bekerja di bidang ini.

*Keempat*, tak banyak buku dan isu yang serius menulis dan merisetnya. Akibatnya, kita abai pada soal maha penting ini di republik. Jujur, kami tak menemukan banyak buku, jurnal dan hasil riset yang membahas tema ini walau sudah mengunjungi banyak perpustakaan dan kota-kota.

*Kelima*, kemakmuran masih dianggap bukan cita-cita bersama bernegara. Tetapi ia dianggap projek individual. Akibatnya, kondisi makmur dianggap hanya keadaan individu yang berkembang, berkemajuan, memiliki keberuntungan dan memiliki status sosial yang sukses. Kemakmuran hanya soal kekayaan, kejayaan, kebahagiaan, keterdidikan dan kesehatan personal; bukan bersama.

Dus, tema kemakmuran ini menjadi sangat penting saat negara-negara besar sepuh nalar memperebutkan ekonomi dan teknologi dunia demi seribu tahun nasib mereka, tetapi bangsa kita sibuk ribut tanpa malu dengan basis identitas purba dan dipimpin para gelandangan politik yang defisit terobosan besar.

Di tangan para gelandangan, kisah republik kita jadi cerita sedih yang tak mampu selesaikan macet, banjir, kemiskinan dan utang. Mereka cuma sibuk kapling harta, ayat dan syorga. Karenanya, kita yang *crank* mari jangan jemu bertemu. Mencari solusi untuk negeri.

Itulah alasan kami riset kemakmuran dan sejarah kesejahteraan di Indonesia. Tentu sambil menyadari bahwa kemakmuran itu apa yang kita punya. Sedangkan kesejahteraan itu apa yang kita rasa (lahir dan batin). Tetapi, keduanya setali dua wajah: pasangan yang saling menguatkan, bukan menafikan. Semoga



para pembaca bisa ikut diskusinya demi cita-cita besar kita dalam berbangsa dan bernegara. Aamiin.(\*)

*Pertama~*

## **MENYOAL KEMAKMURAN#**

Pada tahun 2015, *The Legatum Institute* mengeluarkan daftar indeks kemakmuran negara-negara sedunia. Berdasarkan data indeks kemakmuran tersebut, Indonesia berada di urutan ke-69 dari 142 negara. Meski demikian, posisi Indonesia naik 21 peringkat dibanding tahun sebelumnya.

Lumayan! Yang jadi soal adalah, mengapa kemakmuran kita belum maksimal di tengah keberlimpahan SDA? Mungkin jawabannya karena kita mengalami kutukan sumber daya alam dan kutukan keberlimpahan.

Tetapi, di luar dua hal tersebut, kita juga terperangkap pada konsepsi “kesejahteraan individual.” Dus, bukan kesejahteraan negara (*welfare state*) apalagi kesejahteraan warga (*welfare society*) yang jadi matriks dan tujuan. Konsep kesejahteraan individu ini didesain dari matriks iklan dan tipuan. Artinya, tiap individu diperangkap oleh pasar untuk hidup dari, oleh dan untuk dirinya. Jadilah individu serakah.

Lahirlah masyarakat iklan. Bukan masyarakat sejahtera. Inilah konstruksi realitas kehidupan yang terjadi sekarang di Indonesia. Realitas masyarakat konsumeris yang hidup berdasarkan angka-angka yang sangat dipengaruhi iklan di media.

Tetapi, dalam masyarakat (ber)konsumen, konsumsi kita tidak mendapatkan tempat sebagai pemenuhan kebutuhan. Tapi, ia hadir sebagai prestise sosial belaka. Kesejahteraan dan kemakmuran bersama tak jadi ontologi. Apalagi epistema dan aksi-aksi.

Kehidupan konsumerisme ini disebabkan oleh iklan yang mendominasi kehidupan. Iklan produksi pasar, juga kreasi individu serakah yang berbentuk oligark. Iklan yang menyajikan sebuah realitas non-riil yang kamuflatif bin sorgawi. Lahir dan berkembanglah “komodifikasi apa saja via iklan yang memanipulasi masyarakat penikmat iklan.”



Para penikmat ini mengembangkan dan mentradisikan balik, arus iklan awal yang mereka terima. Jadilah pusaran resiprokal. Mereka tak bisa lagi keluar dari cengkraman itu. Bahkan berpikir solusi saja tidak. Apalagi mencipta “jalan keluar.”

Tentu, akibat berputar-putar di seputar negeri iklan; konsumsi iklan; resiprokal iklan maka lahirlah hiperrealitas yang berbentuk galaksi simulakra. Hilirnya, kita tak lagi hidup bersama, apalagi menempuh kemakmuran bersama.

Kemakmuran menjadi ilusi. Kemakmuran bersama menjadi mati. Terkubur bersama ketiadaan kesadaran diri. Tentu ini pekerjaan besar kita semua. Sebab, kemakmuran bersama itu cita-cita utama kita dalam bernegara.(\*)

*Kedua~*

## **ANARKHI KEMAKMURAN#**

Pada mulanya malas. Lalu, kemalasan menjadi kebiasaan. Dicampur doa dan dupa, banyak orang berpikir, itulah jalan kemakmuran. Juga jalan mencapainya (metoda). Agama lalu jadi candu yang membuat pemeluknya tak perlu bekerja cerdas dan berinovasi secara jenius.

Padahal, kemakmuran itu dipengaruhi banyak faktor. Minimal ada lima hal. *Pertama*, faktor sumber daya manusia (SDM). Ini merupakan faktor terpenting dalam proses pencapaian kemakmuran. Cepat lambatnya proses tersebut tergantung kepada sejauhmana sumber daya manusianya selaku subjek memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan cita-cita tersebut.

*Kedua*, faktor sumber daya alam (SDA). Tentu saja, faktor ini tidak menjamin keberhasilan proses kemakmuran jika tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud di antaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

*Ketiga*, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan kemakmuran. Pergantian pola kerja yang semula manual digantikan oleh mesin canggih berdampak kepada aspek

efisiensi, kualitas dan kuantitas yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pemerataan dan pertumbuhan kemakmuran bersama.

*Keempat*, faktor budaya. Faktor ini memberi dampak besar yang berfungsi sebagai pembangkit atau penghambat kemakmuran bersama. Budaya yang dapat mendorong kemakmuran bersama di antaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat kemakmuran bersama di antaranya sikap egois, boros, KKN, dan anarkhis.

*Kelima*, sumber daya modal. Tentu, modal dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mengolah SDA guna meningkatkan IPTEK serta mentradisikan budaya yang sehat. Sumber daya modal berupa uang dan barang-barang menjadi kunci bagi perkembangan dan kelancaran kemakmuran bersama karena semua dapat meningkatkan produktivitas suatu bangsa.

Jika lima faktor tersebut di atas dinihilkan, anarkhi kemakmuran dimulai. Seringkali atas nama takdir, manusia merasa mampu kaya dan makmur tanpa mengindahkan aturan dan moral serta habitus gotong-royong. Padahal kita sama-sama tahu bahwa kemakmuran tanpa kejuangan dan kejujuran pasti dikutuk alam raya; awal punahnya keadaban dan kemanusiaan.

Ujungnya: kemelaratan bin kemiskinan. Cucunya lahir kemudian, berupa kebodohan. Hilirnya, penjajahan yang tak berakhir. Padahal kata sang bajik, “barangsiapa bekerja keras, maka kemakmuran itu untuknya. Barangsiapa menumpuk malas, maka kemelaratan itu akan menjadi miliknya.”

Mengapa kita melarat? Yang paling utama adalah karena kita tak mau membuang metoda hidup lama yang usang. Hidup kita aman di negara tanpa kreasi kecuai utang, gadai dan obral. Sedihnya, melarat jadi kunci dan syarat di negara produsen pengkhianat dan penjahat terbesar di dunia dan akherat.

Tentu. Mencipta hidup baru itu mudah. Meninggalkan pola hidup lama itu yang susah. So, soal melarat adalah soal “kenyamanan” pada kejahiliyahan (bersama) yang diresmikan oleh negara via begundal kolonial yang berkuasa dan teks-teks ketikan mereka.

Itulah mengapa, politik pilpres (dengan pola lama) kita baru berhasil menegakkan demokrasi (para) pencuri yang menternak pencuri demokrasi. Resiprokal. Tak lebih. Tak kurang.

Maka, berhati-hatilah. Banyak kejahatan negara melarat dimulai dari kemelaratan ide dan pembagian sogok serupiah-dua rupiah. Kekerean dan kejahatan ini juga bisa berjejak pada ketiadaan sejarah perlawanan dan tanpa genealogi pemikiran serta ilusi yang dibesarkan via media (pencitraan yang hiperrealitas).

Meninggalkan dan menciptakan. Itu kuncinya. Bukan yang lainnya. Sediakah kita merawat etos dan mental revolusi, inovasi dan progresifitas? Jika tidak, anarkhi kemakmuran akan terus berjalan. Dan, kemelaratan jadi keseharian. Kepicikan jadi keniscayaan.

Jika itu takdir kita, saya harus iba dan kasihan melihat Indonesia: melihat kita semua. Terutama para pribumi yang ksatria. Bangsa lain sudah membuat road map mengkoloni planet di jagat raya, kita masih belajar hitung manual; tipu-tipu dan sinetron rongsokan. Itupun tak lulus. Jadinya, jahiliyah turun-temurun. Kebodohan yang diwariskan.(\*)

*Ketiga~*

## **KEMAKMURAN YANG HILANG#**

Di manakah kini kemakmuran bersama berada? Tidak mudah menjawabnya. Sebab makmur adalah suatu keadaan di mana kita dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier dengan mudah.

Kemakmuran juga berarti mendapatkan semua kebutuhan-kebutuhan tersebut tanpa adanya tekanan dan kesulitan yang amat sangat. Dan, pelakunya mampu mengatur keadaan finansial, waktu dan tenaganya dengan ceria.

Selain itu, pelaku dapat dikatakan makmur jika memiliki waktu untuk bersosialisasi, menjalankan hobi dan rekreasi. Di sini, penggunaan ilmu ekonomi yang tepat dapat membantu mencapai kemakmuran sehingga semua kebutuhan tercapai dan termiliki. Jika hidup makmur, maka kita akan lebih mudah dalam meraih kebahagiaan dan kesenangan hidup di masa kini dan mendatang.

Dalam kemiskinan purba yang belum terpecahkan solusinya, kita perlu terus mencari jalan keluarnya. Dalam ilusi kemakmuran yang belum merealitas, kita harus optimis bekerja. Sebab, kalian datang dari masa lalu. Aku datang dari masa depan. Bertemu kita membentuk peradaban untuk memastikan kemakmuran bersama sebagai takdir akhirnya.

Kita tahu, peradaban berasal dari kata adab yang bermakna aturan, nilai, tradisi dan konsensus yang idealistik. Dus, di sini perlu kerelaan berbagi, berkomunikasi dan berkomitmen. Agar tensi lembut dan resonansi indah dihayati. Agar lagu makin merdu dan tembang-tembang segera mewaraskan kehidupan.

Agar ide-gagasan cerdas menjadi keseharian. Dan, para jenius memimpin dengan hikmah yang bajik untuk menghasilkan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mentradisikan keadilan-kesejahteraan-kemakmuran-kebahagiaan. Inilah nantinya yang kita sebut Indonesia baru. Inilah yang akan terjadi. Inilah kita dan kami yang sebentar lagi hadir. Satu kehadiran di dalam republik Indonesia yang berideologi Pancasila akan mentradisikan insan cerdas yang ramah pada agama publik berdimensi multikultural.

Dan, dalam agama publik yang multikultural terdapat ilmu pengetahuan yang mencerahkan. Serta, dalam ilmu pengetahuan yang mencerahkan terdapat mental merdeka, mandiri, modern dan martabatif. Inilah mental konstitusional yang anti kolonial.

Tentu saja, mental ini bekerja menghancurkan warisan penjajahan: oligarkis, kleptokratis, kartelis, fundamentalis, fasis dan predatoris. Tentu saja, mental ini bekerja mentradisikan warisan para pahlawan pendiri republik: berspiritualitas, berkemanusiaan, bersatu, bergotong-royong dan berkeadilan.

Adakah kemakmuran sudah jadi kenyataan? Adakah kita sudah sampai ke sana? Segera! Sebab, aku yang memimpinya. Menyitir sastrawan besar Kahlil Ghibran, “suara kehidupanku memang tak akan mampu menjangkau telinga kehidupanmu; tapi marilah kita coba saling bicara barangkali dapat mengusir kesepian dan kejahiliah yang bertalu-talu.”

Seperti museum-museum tua yang purba, aku pasti setia dengan cita-cita menaklukan dunia. Guna memastikan keadilan semesta.(\*)

*Keempat~*

## **KONSTITUSI DAN KEMAKMURAN#**

Apakah konstitusi kita menempatkan kemakmuran sebagai isu sentral? Tidak. Se jauh yang dapat kita baca, kemakmuran di konstitusi kita merupakan tafsir dari kata makmur yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 alinea kedua: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan *makmur*.”

Dan, juga tafsir dari bunyi pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 yaitu, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar *kemakmuran* rakyat.”

Makmur dan hak untuk mendapatkannya dilengkapi oleh empat bab dalam konstitusi kita yaitu: 1) Bab X tentang warga negara dan penduduk: terdiri dari pasal 26-28. 2) Bab XA tentang HAM: terdiri dari pasal 28A-J. 3) Bab XIII tentang pendidikan dan kebudayaan: terdiri dari pasal 31-32. 4) Bab XIV tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial: terdiri dari pasal 33-34.

Dari pasal-pasal yang menjadi tafsir atas kata kemakmuran maka, makmur itu cita-cita ultima bersama dan menjadi keadaan pasca kemerdekaan. Memakmurkan dengan demikian menjadi tugas negara dan pemerintah. Sebab, salah satu dari empat tugas konstitusional negara adalah, “memajukan kesejahteraan umum.” Tentu, yang dimaksud kesejahteraan umum di sini adalah kemakmuran bersama.

Tetapi, tugas konstitusional itu tak mudah. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, jumlah penduduk miskin kita per September 2018 mencapai 25,67 juta jiwa. Angka resmi ini relatif stabil dari tahun ke tahun. Angka sesungguhnya dua kali lipat, 51 juta jiwa.

Singkatnya, kemakmuran berasal dari kata dasar makmur. Secara umum, “makmur” memiliki kriteria kondisi sebagai berikut: 1) Terpenuhinya kebutuhan pokok (*primer*), berupa sandang, pangan, dan papan; 2) Mampu menjangkau kebutuhan sekunder maupun tersier dengan mudah; 3) Tidak memiliki tekanan batin, sehingga pikiran

ringan; 4)Memiliki orang atau kawan yang menjadi tempat kepercayaan; 5)Tidak kesulitan mengatur waktu, tenaga, maupun finansial; 6)Tercukupinya kebutuhan diri akan rekreasi dan mengerjakan hobi.

Kemampuan kita dalam bernegara untuk mencipta dan mentradisikan kemakmuran tentu merupakan tantangan. Karenanya, jangan hanya bicara soal Indonesia dan kesejahteraan. Mari bicara tentang kita yang lupa kemakmuran bersama; tentang warna bendera sendiri. Atau tentang kita yang membuat lupa pada sesama saat berkuasa.

Sebab, seringkali kita lupa pada bisul tumbuh subur makmur di ujung hidung yang memang tak mancung. Kita lupa saat duduk dan dilayani oleh birokrasi. Kita lupa saat semua yang buruk rupa coba diungkap sebaliknya oleh media.

Kemakmuran kita tak kunjung merata, tak kunjung tiba, tak kunjung merealitas. Mengapa? Tentu karena kini kita menukar cita-cita itu dengan agama baru bernama korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Agama ini tumbuh subur. Hasilnya berupa tikus-tikus tak kenal kenyang. Rakus-rakus bukan kepalang. Otak tikus memang bukan otak udang. Selalu senang saat negara oleng. Selalu tumbuh walau seniornya sudah ditangkap KPK.

Ya. Panen koruptor ini menarik karena menghancurkan mimpi makmur bersama. Mungkin karena, “manusia Indonesia tidak bisa menanggung beban kehampaan dan kenestapaan; lalu mereka akan mengisi kekosongan itu dengan menciptakan lokus baru untuk meraih hidup yang bermakna. Yaitu dengan menjumlah angka-angka walau diharamkan agamanya.”

Tentu saja, berhala koruptor bukanlah pengganti yang baik untuk masa kini dan masa depan; jika kita mau menciptakan gairah keIndonesiaan yang baru untuk abad baru: untuk generasi baru. Kita harus merenungkan dengan seksama sejarah kemakmuran ini demi menarik beberapa pelajaran dan peringatan. Pelajaran bagi tegaknya kemakmuran bersama dan peringatan bagi mereka yang mengkhianati dan merobohkannya.

Dus, kemakmuran harus direbut dan direalitas. Mengapa? Sebab, pemikir besar Karl Marx (1818-1883) berfirman, “jangan pernah berharap kaum kapitalis-borjuis-begundalis akan



memperjuangkan nasib kaum miskin dalam pesta-pesta makan malam mereka dengan anggur merahnya.”(\*)

*Kelima~*

## **MEMAKMURKAN BANGSA#**

Tak ada bangsa berniat paria. Tak ada negara bermimpi menderita. Tak ada manusia memuja lara. Sebaliknya, tiap-tiap bangsa, negara dan manusia memimpikan dan berusaha merealisasikan hidup sejahtera; makmur jiwa raganya, selamanya.

Dus, bangsa makmur, negara kemakmuran dan manusia sejahtera merupakan kondisi ideal. Ia dikonsepsikan sebagai kondisi puna sempurna. Bangsa dan negara bertindak sebagai penjamin bagi seluruh warganya untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar hidup mereka. Baik kebutuhan jasmani, rukhani, duniawi dan ukhrawi (intelektual, kapital, spiritual dan relasional).

Dengan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut, warga negara diharapkan bisa hidup sehat, bahagia, toleran dan memiliki kemampuan melakukan gotong-royong dan fungsi sosial lainnya. Mereka yang lemah, cacat dan kekurangan akan mendapatkan perlindungan dari negara. Mereka tidak akan menjadi korban dari orang-orang yang jahat (*oligarki predatorik*).

Bangsa makmur dengan demikian bertugas memproduksi warga cerdas dan kritis. Tetapi, di atas segalanya, kritisisme lahir kokoh jika apa yang ia makan adalah makanan halal. “*You are what you eat*” kata para filsuf. Jika suara-suara kritis hilang, ada baiknya kita cek, makanan apa yang telah mereka telan. Jika seseorang sejak awal diam dan membebek apalagi menjilat, besar kemungkinan makanan haram telah lama ia telan dari orang tuanya, bahkan sejak dari perut ibunya.

Indonesia. Tanpa warga cerdas dan kritis, Aku selalu teragap dengan sammu. Hadirmu menjarah masa depanku. Jiwamu menghapus ejaan masa laluku. Akalmu melambatkan waktu kiniku. Tapi, ingin kufatwakan padamu bahwa betapa jahil menikmati keadaanmu kini dengan orang yang menyakitimu di semua tempat dan keadaan yang lapuk membatu: para fundamentalis, fasis dan begundalis.



Indonesia yang belum makmur. Aku menyanyi untukmu. Lagu karya Gesang berjudul Jembatan Merah. Dengan syahdu dan tak merdu. *Jembatan merah/Sungguh indah/Berpagar gedung megah/Sepanjang hari yang melintasi/Silih berganti/Mengenang susah hati patah/Ingat jaman berpisah/Kekasih pergi sehingga kini/Belum kembali/Biar jembatan merah/Seandainya patah/Akupun bersumpah/Akan kunanti dia di sini/Bertemu lagi.*

Indonesia harus makmur. Indonesia wajib sejahtera. Dengan rakyat yang beradab dan sentosa. Kini. Jika belum makmur, maka rindu apa lagi yang kalian dustakan. Cinta apa lagi yang kalian sembunyikan.

Bukankah sudah kuketik dalam buku-buku bahwa sebaik-baik bangsaku adalah yang bersyukur atas cinta dan rindu yang kita praktekan. Dan, sejahil-jahil negaraku adalah yang mengingkarinya dengan hidup bersama tanpa cinta dan rindu dalam hidupnya: tanpa gotong-royong. Serta, seburuk-buruk warga negara adalah ia yang tak berjihad memakmurkan bangsanya.

Mengapa mereka jahil dan buruk takdir? Adalah karena keringat dan ilmu di Indonesia hanya dinilai “cuma” seharga piagam yang dipigura. Inilah sebab utama para warga kita berkhianat membela pengkhianat. Membela yang bayar, bukan membela yang benar. Rakyat dan warga independen yang kritis menjadi defisit. Kitalah yang telah membunuhnya. Kitalah kini korban dari lingkungan yang kita ciptakan.(\*)

*Keenam~*

## **KANVAS KEMAKMURAN#**

Bagaimana gambar mutakhir kemakmuran Indonesia? Jauh. Makin menjauh dari keidealan. Singkatnya, masih buram. Sebab tak menjadi program unggulan. Tetapi, apakah kita harus diam? Adakah bedanya hanya menunggu dengan tanpa mengkanvas lukisan? Kukira, sama-sama kosong. Melompong. Gugun. Sesal di kemudian.

Maka, agar ada hasil, kita harus coba tuang ke dalam kanvas dengan garis dan warna-warni yang kita ingini; kita rindui. Kita harus terus melukis; terus menghibridasi; terus berlari. Mengejar yang belum pasti agar ada kepastian.

Taukah kalian. Dengan beberapa pertanyaan. Apakah ada bedanya bila mata terpejam? Apakah ada bedanya bila fikiran jauh mengembara, menembus batas langit, melampau zaman ganjil seperti hari-hari ini? Pasti ada. Mengapa?

Sebab cita-cita kemakmuran telah membakar jiwa kita; menumpuk pondasi semangat bekerja. Harum aroma kesuksesan membebaskan kepala dan fikiran kita untuk berkreasi. Selalu. Seirama alam raya: meneguhkan kemenangan.

Mari kini kita menggambar. Mari kita kuas jejak bumi manusia. Mari kita potret rumah kaca kemanusiaan plus keindonesiaan. Kita pahami bahwa di bumi yang berputar pasti ada gejolak; banyak pemberontak. Saling sikat sikut. Lupa gotong royong. Praktik gotong nyolong.

Tetapi terus pahami. Nikmati dan ikuti saja iramanya, isi dengan rasa, pecahkan dengan nalar semesta. Bahwa, semua akan indah pada waktunya: di situ ada usaha maka di situ ada jalan plus solusi.

Seringkali memang di menara langit halilintar bergetar. Sambar bakar kehidupan kita jadi penuh paria. Sehingga kadang kita merasa tak terlindung. Lalu, kita terbakar kegetiran. Menangis segugukkan. Tidak tak terperikan. Lahir jejak dada yang terluka, duka yang tersayat, rasa yang terpapar derita. Dan, tak satupun saudara dan sahabat mengerti. Apalagi peduli dan empati.

Saat kita hidup dengan semilyar kemalangan, sadarlalah bahwa di negara para budak, pemimpin tak mungkin mundur walau salah dan jahat berulang-ulang. Karena itu, jika ingin tahu keadaan sebuah negara-bangsa, maka lihatlah pemimpinnya. Kalau ia pembohong, curang, kejam dan zalim maka begitupula rakyatnya. Begitulah potret kita yang sesungguhnya.

Lalu, apa kanvas kita ke depan? Bagi yang masih waras, hidup harus disandarkan pada “prinsip harapan.” Sebab, hidup yang setengah-setengah selalu tak berbuah. Harapannya untuk Indonesia, yang pertama-tama tentu saja memperoleh bentuknya pada manifestasi tiga gabungannya: “satu nusa, satu bangsa, satu bahasa.” Yang kedua, gotong-royong mencipta dan mencapai kemakmuran bersama.

Harap yang ketiga adalah melampaui ras dan klan menjadi Indonesia (yang raya). Yang keempat, menjadi Indonesia karena ide

dan praktik perlawanan semesta pada penjajah dan warisannya: fasisme dan rasisme yang mengkangkangi kemakmuran milik warga semua.

Sebab itu, ijtihad dan jihad hari ini adalah menuntaskan problem utama ummat: kemiskinan, kebodohan, kepengangguran, ketimpangan, kesakitan, ketergantungan, keterjajahan, kekalahan dan kejjikan (9K). Dan, itu tak cukup dengan doa, ziarah plus tahfid kita-kitab suci. Harus lebih meraksasa. Panjang. Full power. Bernas. Bernalar. Dari setrilyun pintu, demi kanvas baru untuk melukis lebih terpadu.(\*)

*Ketujuh~*

## **SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT#**

Judul tulisan ini dikutip dari frasa dalam pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 yang berbunyi, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Rakyat yang mana? Seluruh warga negara Indonesia. Tanpa pandang bulu. Bukan pribadi-pribadi dan golongan. Tetapi ada yang dikhususkan sehingga didahulukan, yaitu yang yatim-piatu, cacat, kekurangan dan terpinggirkan.

Makmur yang bagaimana? Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan bahwa kalimat “sebesar-besar kemakmuran rakyat” harus dimaknai dalam empat tolok ukur yaitu: 1)Kemanfaatan sumber daya alam bagi semua rakyat; 2)Pemerataan manfaat sumber daya alam bagi semua rakyat; 3)Partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam; 4)Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Negaranya siapa? Adalah negara rakyat Indonesia yang diisi oleh agensi di empat posisi: eksekutif, legislatif, yudikatif dan rakyat biasa yang bergotong-royong menjadi panitia kesejahteraan bersama.

Dikuasai itu seperti apa? Tentu, makna penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak serta terhadap sumberdaya alam (SDA) tidak menafikan kemungkinan perorangan atau swasta berperan, asalkan lima peranan negara/pemerintah (berupa: kebijakan, pengaturan,

pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan) tetap terpenuhi secara *clear and clean*.

Rakyat pasti paham, kemanapun mereka pergi, bayang-bayang kemakmuran mengejar. Bersembunyi di manapun, kemakmuran tak selalu ditemukan. Demi pertimbangan tersebut maka Mahkamah Konstitusi telah menempatkan rakyat secara kolektif sebagai subjek. Subjek ini kemudian memberikan mandatnya kepada negara untuk membuat kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Rakyat pasti merasa. Ada yang tak mampu mereka lupa. Kemiskinan dan siksa di zaman penjajahan. Penjara karena kritis di zaman kemerdekaan. Nasib yang meremang kala rezim berganti tetapi kehidupan tak membaik. Ketika pilpres tiba, tak tahunya bukan kemakmuran yang datang menjelang.

Karenanya, orientasi mewujudkan kemakmuran perlu diarahkan pada tiga hal yang merupakan satu kesatuan yang utuh, yaitu:

- 1) Mewujudkan keadilan sosial di mana saja dan kapan saja;
- 2) Meningkatkan efektifitas, kejujuran dan pemerataan ekonomi yang cepat dan tepat; dan
- 3) Pelestarian lingkungan dengan pola penggunaan tanah, air/lautan dan udara yang berkelanjutan plus ramah lingkungan.

Dengan demikian, setidaknya tersedia landasan atas apa yang dimaksud sebagai sebesar-besar kemakmuran rakyat secara lebih konkrit dan riil melalui apa yang ditentukan dalam kehidupan undang-undang kita dan dapat dipergunakan sebagai landasan untuk menyusun ketentuan terkait dengan target sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Tetapi, kemakmuran bersama akan jadi mimpi karena banyak hal. *Pertama*, imperialisme yang tidak selesai sehingga melahirkan politik *divide et impera*, yakni politik pecah-belah. Imperialisme di mana saja, apapun bentuknya, punya slogan sama: "*Verdeel en heers*:" pecahkan dan kuasai! Dengan menggunakan mantra itu, imperialisme menguasai negara lain.

*Kedua*, membuat Indonesia menjadi bangsa terbelakang, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan kebudayaannya. Caranya,

dengan menghancurkan fikiran-fikiran (akal budi), warisan, sejarah perlawanan dan pustaka atau buku-buku milik rakyat.

*Ketiga*, menanamkan mentalitas inferior (*inferiority complex*) alias *mental inlander* di kalangan rakyat, agar mereka kehilangan kepercayaan diri dan takluk-tunduk terhadap penjajah. Di mana pun imperialisme selalu berusaha menutupi maksudnya, bahkan menciptakan teori manis untuk mencapai tujuannya.

*Keempat*, imperialisme selalu berusaha menyakinkan rakyat jajahan bahwa ada persamaan kepentingan antara mereka dan rakyat jajahan. Dan, untuk mengikat hati rakyat jajahan, mereka menyerukan perlunya “asosiasi politik” bersama. Di lapangan ekonomi, kaum imperialis selalu berpropaganda bahwa kehadiran mereka membawa keuntungan, seperti adanya industrialisasi, pembangunan infrastruktur, adab, sekolahan, agama dan lain-lain.

Mereka juga berpropaganda bahwa penanaman modal asing, yang *notabene* satu bentuk imperialisme modern, sangat menguntungkan negara jajahan. Sebab, penanaman modal asing menghasilkan pembangunan, pembukaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dll.

Karenanya, Bung Karno (1901-1970) menyebut kulminasi kita dalam bernegara merdeka itu tiga hal: adil, makmur, bermartabat. Bung Hatta (1902-1980) menyebut bahwa pemerintah adalah panitia kemakmuran rakyat. Tan Malaka (1897-1949) mengatakan akal merdeka menuntun kita berbagi dalam kemakmuran. Jendral Soedirmam (1916-1950) berfatwa bahwa kemakmuran harus dicapai dengan gerilya dan cinta negara.

Dus, jika kemakmuran makin hilang, rasanya kita perlu merenungi kalimat bijak, “*Zaa alhaq wa jahaqal bathil. Innal baatila qana jahuka.*” Ketika datang kebenaran maka pasti kebathilan akan sirna. Maka bersiaplah untuk memenuhi barisan guna menegakkan kebenaran dan keadilan. Kita lawan para perampok oligark yang telah menumpuk harta secara haram sehingga warga lainnya paria. Kita tegakkan negara Pancasila di mana saja dan kapan saja. Kita tradisikan keadilan dan kemakmuran di manapun dan kapanpun.(\*)

*Kedelapan~*

## **ONTOLOGI KEMAKMURAN INDONESIA#**

Kini, dunia kita dikendalikan dan dicengkeram oleh jaringan kreditur dan rentenir internasional dan lokal. Inilah subjek utama defisit kemakmuran Indonesia. Mengapa? Tentu karena tak banyak yang baca. Tentu tak banyak yang paham. Tak banyak yang menyelidiki. Tentu tak banyak yang mengerti.

Karena itu, pertanyaannya kini adalah, “siapakah kita (dalam ekonometrika)?” Ternyata, kita adalah apa yang kita konsumsi (*we are what we eat*). Kita adalah deret ukur dan angka-angka konsumen belaka. Akibatnya, konsumsi menjadi penentu fundamental dalam menetapkan kesejahteraan dan tingkat kemiskinan seseorang bahkan suatu negara. Tanpa konsumsi yang sehat, kemakmuran kita adalah utopia.

Kemakmuran dalam bahasa Inggris adalah *prosperity*; *aishwarya* (Sansekerta), *aurelia* (Latin); *alifaningdyah* (Jawa). Kata ini sering dimaknai dalam lima terminologi: *wealth*, *wealthy*, *well-off*, *rich* dan *affluent*. Tetapi, kelima kosakata tersebut memiliki substansi yang sama, yaitu kemampuan finansial yang mapan.

Konsep kemakmuran dan kekayaan dalam politik selalu dihubungkan dengan negara. Akibatnya, kita kenal istilah negara persemakmuran dan bangsa kemakmuran. Yaitu konsep di mana negara memainkan peran kunci dalam perlindungan dan promosi ekonomi serta kesejahteraan sosial warganya.

Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan kesempatan, distribusi kekayaan yang adil, dan tanggung jawab publik untuk mereka yang tidak mampu memanfaatkan diri dari ketentuan minimal untuk kehidupan yang baik dan aman.

Pertanyaannya, mengapa banyak negara tak membaik takdir kemakmurannya? Ternyata jawabannya karena banyak negara terjebak dalam hutang yang dalam (*debt trap*) dan utang najis (*odious debt*). Padahal, utang (negara), pemberi maupun penerima adalah alat perang modern. Bagian dari *currency war*. Di sini, tentu juga perang kurs, perang dagang, dll.

Perang mata uang adalah model peperangan yang dikembangkan dari cara pikiran yang tidak lazim. So, di luar aturan



peperangan umum, dengan spektrum perang yang sangat dalam karena menggunakan uang, mata uang, angka-angka dan ekonometrika.

Tentu saja, perang kali ini tidak semata-mata demi profit. Lebih jauh lagi, ini semua dilakukan demi menjamin kesinambungan dan keberlanjutan (bahkan keabadian) rezim finansialisasi dari kapitalisme global kontemporer. Bagaimana peta jalannya?

*Pertama*, tentu dengan mengamankan ekonomi riil yang menjadi jangkar bagi ekonomi finansial melalui proses finansialisasi (bank, kurs, utang, asuransi) maka keberlanjutan diktator ekonomi finansial akan aman dan sentosa sepanjang masa: setua usia.

*Kedua*, dengan mencipta kurikulum (agar terlihat natural) dan agensi di mana-mana. Akibatnya, kini dunia kita dikendalikan dan dicengkeram oleh jaringan kreditur dan rentenir yang tidak tak terbaca mata awam. Kreditur adalah pola simpan pinjam purba. Sedang rentenir adalah pola simpan pinjam pengambilan jaminan bila terjadi kegagalan.

Tetapi, taukah kalian jika seseorang berutang kepada bank sebanyak seratus juta, maka bank memilikinya. Sebaliknya, jika seseorang berutang kepada bank sebanyak seratus triliun, ia yang memiliki bank. So, hutanglah sebanyak-banyaknya sampai banknya bangkrut.

Dalam sejarahnya, manusia menciptakan uang dan bank untuk membantu meringankan bebannya. Kini, uang dan bank memperbudak manusia. Inilah zaman rentenir sebagai pelanjut dari peradaban kreditur.

Dari sistem kredit sederhana, dunia akhirnya mengadopsi dua sistem ekonomi utama. *Pertama*, adalah *gold standard system*. *Kedua*, *fiat system*. Terkait dengan kredit, sistem ini mengharuskan bank, sebagai penyalur kredit, memastikan adanya uang sebelum memberikan kredit kepada nasabah. Bila tidak ada persediaan uang di bank maka bank tidak bisa menyalurkan kredit.

Sistem ini berjalan selama beberapa waktu hingga pemerintahan Presiden Nixon (1913-1994). Lalu, ia mengganti *gold standard system* menjadi *fiat system*.

Tapi ingat, kisah tentang uang, utang dan finansial kebanyakan adalah kisah tentang keserakahan, penipuan dan kecurangan. Kisah



penjelma peradaban sekaligus perusaknya. Kisah pengendalian sekaligus anarkhinya.

Sebagai contoh, para ekonom mencipta mutan uang artifisial untuk menggantikan uang asli. Hal itu adalah manifestasi penipuan dan kecurangan (*fraud*) pertama. Uang artifisial sangat berbeda dengan uang asli karena uang asli mempunyai nilai intrinsik, sedangkan uang artifisial tidak.

Satu-satunya nilai dari uang artifisial adalah kekuatan pasar. Nilai pasarnya akan bertahan sepanjang ada kepercayaan publik dan permintaan terhadapnya di pasar. Permintaan itu sendiri berdasarkan kepercayaan. Sayangnya, kepercayaan adalah sesuatu yang mudah dimanipulasi: via media dan agensi.

Dan, tipuan kedua adalah mitos asal muasal rezim kertas. Rezim tanpa kekayaan stabil (emas). Rezim angka (moneteris) dan mitos hitungan (pasar). Kita tahu bahwa era tahun 1970-an, sistem *Bretton Woods* runtuh. Tidak diberlakukan lagi *gold exchange standard*.

Lalu, dilahirkanlah rezim sistem tukar menggantung yang dapat disesuaikan (*adjustable-peg exchange-rate regime*). Inilah tipuan ketiga. Yang keempat adalah munculnya konsep baru yang disebut '*casino capitalism*.' Yaitu, negara memiliki peran sebagai agen spekulator yang akan mendominasi pasar luar negeri.

Dalam bentuk ini, secara finansial global, para aktor akan bertindak secara *voluntary* dan '*casino capitalism*' ini bersifat '*unpredictable and avoidable*,' di mana dampak yang dihasilkan akan mempengaruhi setiap individu dalam dunia perekonomian. Di sini lahirlah *currency war*, *debt trap*, *bank independent*, *inflasi*, *deflasi*, *asuransi*, *leasing*, *rezim pertumbuhan* dan berbagai hilirnya.

David Graeber (2011), antropolog dan sejarawan yang banyak menulis tentang uang, hutang, kapitalisme dan peradaban, bertesis dengan tajam dalam bukunya, "Debt: The First 5,000 Years." Buku ini menjadi bukti keberagaman sekaligus kedalaman pengetahuannya plus tawaran mendiskusikan peradaban baru guna membahas masa depan.

David menggunakan pendekatan antropologi sebagai pintu masuk dalam menulis ulang sejarah penjarahan dan penjajahan. Tentu menarik jika kita mulai memikirkan ulang hal-hal fundamental yang mengurangi dan menggerogoti kemakmuran negara Indonesia.(\*)

*Kesembilan~*

## **ROAD MAP KEMAKMURAN KITA#**

Berkemakmuran itu berkoperasi. Ini tesis anti imperialisnya. Dan, berkoperasi itu bergotong-royong, daulat insan, daulat nalar bukan daulat kapital. Jika ditelisik dari Alquran, istilah kemakmuran sepadan dengan istilah “falāh.” Kata falāh (aflah, yuflihu) memiliki arti menyuburkan, membuat bahagia, mencapai kesuksesan atau keberhasilan secara stabil berkesinambungan.

Dalam sejarah kehidupan di dunia ini, kata tersebut merepresentasikan empat hal: *baqa* (survival), *ghani* (kaya), *ghana* (merdeka dari keinginan), dan ‘*izz* (kekuatan dan penghargaan). Singkatnya, makmur dan berkemakmuran itu hidup yang berguna secara internal dan eksternal.

Sayangnya, prototipe insan berkemakmuran di Indonesia mengalami hambatan dan penghadangan yang dahsyat. Hal ini karena Indonesia kini menjadi mesin raksasa yang luar biasa memeras harta rakyatnya sampai miskin semiskin-miskinnnya sambil melipat gandakan harta konglomerat sampai tak masuk akal hingga membentuk oligarki kapital yang tiada duanya dalam sejarah kita sebagai negara modern.

Saat bersamaan, koperasinya mati dan korupsinya tidak menurun. Bahkan makin tidak tak terpikirkan. Demikian pula kolusi dan nepotismenya yang makin subur. Problem kita dalam bernegara juga tak bisa diselesaikan oleh banyak sarjana, kaum terpelajar, apalagi dukun dan tentara. Yang tampil justru bukan menyelesaikan masalah tetapi menjadi bagian integral dari masalah; menambah masalah; meruwetkan pokok masalah.

Sesungguhnya, oleh para pendiri republik, Indonesia dihadirkan dengan Pancasila untuk menghancurkan penjajahan di atas dunia; memastikan ketertiban umum; membagikan kesejahteraan dan mengkurikulumkan tegaknya keadilan. Tetapi kini, misi suci itu terbalik. Tugas mulia itu dilupa. Road map itu jadi jampi-jampi yang tak sakti.

Fungsinya sebagai negara makin hari makin tumpul jika berurusan dengan konglomerasi tetapi makin tajam jika bergulat

dengan kaum papa. Hadirnya tak menggenapi kebaikan dan perginya tak mengurangi keburukan.

Kini, makin banyak anak-anak muda berprestasi yang tak mengerti Indonesia mau ke mana. Sejak beberapa tahun terakhir, bahkan memastikan memberi beasiswa buat warga negaranya yang serius belajar dan bekerja saja tak bisa lancar.

Karenanya, kita perlu pikiran, ucapan, tulisan dan tindakan baru. Mengikuti tesis kawan [Suroto Ph \(2019\)](#), “Republik ini butuh pikiran kreatif untuk merumuskan ide dan strategi ekonomi baru, bukan mengulang terus ide ekonomi klasik yang membuat negeri ini berada dalam kesenjangan sosial ekonomi yang semakin tinggi. Ekonomi kuno yang menghasilkan kerusakan alam dan hancurnya kualitas lingkungan hidup, krisis dan ancaman kebangkrutan setiap hari, serta hilangnya kuasa rakyat.”

Jadi, apa *road map*nya? *Pertama*, mengembangkan teologi kemakamuran (*prosperity theology*). Kita perlu menulis ulang doktrin bernegara dan beragama yang mengajarkan bahwa orang Indonesia itu harus sungguh-sungguh beriman dan beramal salih agar kaya dan mengkayakan sesama.

*Kedua*, merekapitalisasi kekayaan laut secara maksimal dan berkelanjutan. Sebab, hasil riset yang dilakukan oleh para peneliti di Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2O LIPI), tercatat bahwa nilai potensi kekayaan laut Indonesia mencapai Rp 1.772 triliun. Ini jumlah yang sangat besar dan pasti mampu meningkatkan derajat ekonomi kita.

*Ketiga*, meredistribusi kekayaan negara dan konglomerat. Redistribusi ini adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat diratakan dan ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada di manapun dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu yang lebih dulu kaya.

Redistribusi menjadi penting karena kekayaan dan pendapatan berkaitan bukan saja dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek ideologi, sosial dan politik. Tanpa redistribusi, kita kesulitan meningkatkan kemakmuran secara bersama dan berkesinambungan.

*Keempat*, rekurikulumisasi sistem ekonomi politik berbasis pemerataan sehingga ada keberpihakan dan keadilan yang bersifat afirmatif terhadap kelompok-kelompok lemah dan dilemahkan.

*Kelima*, masifikasi beasiswa dan perpustakaan. Ini jalan peningkatan SDM secara jenius dan spektakuler agar kita punya generasi bernarasi konstitusi, berkemanusiaan dan berindonesia raya.

*Keenam*, reindustrialisasi yang lebih maju dari sekarang. Program ini harus ditunjang oleh penguatan perdagangan (ekspor barang jadi) dan stabilisasi infrastruktur serta kurs tetap. Sebab, keempat program ini adalah satu kesatuan yang saling terikat, terkonsolidasi dan saling mempengaruhi sehingga tidak bisa dikerjakan secara parsial.

*Ketujuh*, mengerjakan pajak super progresif secara berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan program ini APBN kita akan sehat. APBN yang sehat akan bermanfaat bagi pengembangan sektor industri, penajaman riset dan iptek serta inovasi.

Semua program di atas sangat penting dilakukan sebab warisan terburuk dari penjajahan adalah sebaliknya. Hal-hal yang membuat kita menjadi negara konsumen dan inlander. Tujuh *road map* ini harus kita kerjakan segera agar kemakmuran tak jadi utopia. Kapan? Sekarang juga. Oleh siapa? Ya, oleh kita semua.(\*)

*Kesepuluh~*

## **KEMAKMURAN DAN PERTANYAAN ITU#**

Andaikan penjajah datang kembali. Perlawanan apa yang akan kita beri. Adakah perang yang kita temui. Mirip revolusi para pendiri republik yang banyak akal dan cara. Atau kita kembali lagi dijajah menyerah tak berdaya, pasrah dan tentu saja kalah.

Andaikan krisis berulang. Apakah blusukan itu jadi pilihan. Ataukah ada aksi lainnya. Andaikan konflik itu tumbuh jumbuh. Apakah kita punya cukup kecerdasan. Semua kok kini berjalan datar tanpa dentuman. Padahal kita tahu bahwa keadilan dan kemakmuran itu keniscayaan kehidupan.

Tentu saja keduanya jelas bukan pemberian gratis. Apalagi janji pulsa dan palsu. Semua harus diusahakan: direbut dan dibagikan. Melihat postulat itu, tuan Saafroedin Bahar (2017) mengetik tesis,

“sangat jelas terlihat bahwa keamburadulan Indonesia dewasa ini disebabkan oleh tiga hal: 1)Kekonyolan pemimpinannya; 2)Intervensi dari luar negeri, dan 3)Bungkamnya orang-orang baik dan idealis.”

Akibat dari tiga hal itu yang tua-tua, tak kapok-kapok dalam KKN. Padahal, dunia baik terus menerus berlanjut, sehingga kaum muda waras harus mekar, agar keseimbangan jagat raya tetap harmoni.

Mestinya, demi kemakmuran, politik kita (pileg dan pilpres) penuh ide dan gagasan jenius agar punya makna. Tapi kok belum. Maka, mari sadari bahwa tidak semua harapan harus dimenangkan. Kita harus paham bahwa di dunia ini, tak ada yang bisa dipeluk erat atau dipertahankan sampai mati beneran. Selalu ada yang harus berkorban demi cita-cita dan cinta yang lebih besar serta untuk Indonesia Raya.

Demikianlah kalau kaum tua sadar dan kaum mudanya pintar plus bermoral. Sayangnya kita terlalu pintar dan lulus menternak kaum tua berbaju baru dan kaum muda bermental tua: fasis bin feodalis serta koruptif.

Akhirnya, kita baru bisa melahirkan pemerintahan via demokrasi liberal yang kejahatannya tak termaafkan. Tetapi, membiarkan pemerintahan itu tumbuh menjadi orde kleptokrasi jauh lebih berdosa besar.

Tentu, itu tindakan biadab dari sebagian masyarakat sakit. Ya. Dimulai dari mental yang sakit, aturan yang cacat, praktek yang culas dan diakhiri dengan tindakan-tindakan khianat konstitusi adalah potret kita semua dalam demokrasi hari ini. Hasilnya, kita panen para pemimpin palsu yang menghasilkan janji palsu, program palsu, keputusan palsu, pulau palsu dan realisasi palsu.

Kekuasaan demokrasi liberal kini kehilangan kuasanya; tak ada tajinya. Tunduk pada kuasa yang tak terbaca: kecuali angka dan kertas saja. Tanpa program pro kaum miskin dan termarginalkan, walau mereka marhein dan arabis sekalipun. Padahal, negara tanpa ksatria sejati seperti tubuh tapa jiwa, bagaikan pohon tanpa daun. Salah kita menciptakannya, sesal kita sepanjang masa (kalau nalar masih waras).

Kini, produk revolusi mental adalah janji suci yang terombang-ambing hasutan politik; dihempas para petualang. Akibatnya, kita

semua jadi hambar, tak berkabar. Hanya 33.2% yang puas terhadap kinerja pemerintah selama lima tahun.

Kita, sesungguhnya menunggu republik membaik. Itu kesimpulan dari riset buku-buku terbaik yang sangat serius terhadap kondisi ekopol kita hari lalu dan kini. Jika tidak tobat, kita bisa *going no where* dan *out of order*. Mau? Janganlah. Menjijikan. Malu sama anak cucu.

Yah. Dalam negara swasta yang berfilsafat *pasar adalah tuhan yang maha esa*, kita menghadapi tujuh problem besar: 1)Absennya diskursus negara pancasila; 2)Absennya mentalitas Indonesia; 3)Absennya sekolahan Indonesia; 4)Absennya kurikulum Indonesia; 5)Absennya refrensial Indonesia; 6)Absennya UU Indonesia; 7)Berkuasanya oligarki yang anti pancasila, rabun indonesia, khianat nusantara.

Lalu, kita mau bagaimana? Rakyat kebanyakan hanya bingung dan bisu saja. Menumpuk luka, menjumlah paria dan bertutur tanya tak berjawab segera.(\*)

*Kesebelas~*

## **MAKMURKAN JIWANYA MAKMURKAN BADANNYA#**

Indonesia. Mencintaimu maka jarak dan waktu takkan berarti. Karena kalian akan selalu di hati. Bagai detak jantung yang kubawa kemanapun pergi. Bahkan sampai mati. Indonesia yang mana? Adalah negara yang merdeka karena revolusi. Indonesia yang bekerja untuk keadilan, kemakmuran dan kemartabatan.

Merdeka yang ditafsirkan Bung Sjahrir (1909-1966) sebagai pemanfaatan kekuasaan negara untuk menghalangi laju korporasi nasional dan internasional yang rakus dan menindas, lalu fokus pada upaya mengurangi kesenjangan material, antara lain melalui pajak super progresif serta pengarahan negara dalam memastikan pemberian jaminan pendidikan, kesehatan, pensiun dan jaminan kesejahteraan untuk seluruh warga negara.

Adakah elite kita yang membaca dan meneladani pikiran dan gagasan Sjahrir? Saya sudah lama ragu. Lebih ragu lagi setelah membaca pidato-pidato dan tindakan-tindakan para penguasa.



Buktinya, kemacetan lalu lintas, banjir, kerusakan lingkungan, KKN dan utang negara makin bertumpuk dan berlimpah. Berkali-kali kita buat pemilu guna mencari pemimpin terbaik, hasilnya nol besar. Macet makin macet, banjir tak mengecil.

Kemacetan lalu lintas pasti karena kemacetan pikiran. Akibatnya, kita tak punya solusi. Kita tak punya lompatan. Kita tak punya nalar kreatif yang meraksasa untuk atasi problem laten ini.

Dari sini kita membutuhkan nalar sadar waktu untuk memakmurkan jiwa (akal, nalar, pikiran) secara cepat dan tepat. Memakmurkan jiwa yang terus merdeka dengan mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku agar berorientasi pada kemajuan-kemanusiaan semesta dan hal-hal yang modern, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan bermartabat di dunia internasional.

Bung Karno (1901-1970) berkata, “memakmurkan negara, tak hanya sekadar pembangunan fisik yang sifatnya material, namun sesungguhnya memakmurkan jiwa bangsa. Ya, dengan kata lain, modal utama memakmurkan suatu negara, adalah memakmurkan jiwanya yang utama.”

Keberhasilan memakmurkan jiwa harus disempurnakan dengan memakmurkan badan. Maksudnya adalah memastikan kemakmuran fisik agar mampu mengadakan kegiatan ke arah perubahan yang lebih baik, stabil berkelanjutan plus ramah lingkungan.

Perubahan, perbaikan dan penambahan tersebut dapat dilihat secara kongkrit, nyata dari bentuk perubahannya. Dengan kata lain bahwa perubahan itu identik dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan seperti adanya gedung-gedung, sarana perumahan, sarana peribadatan, sarana pembuatan jalan, sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya.

Kemakmuran jiwa dan badan harus sejalan. Kemakmuran keduanya akan jadi batu pondasi yang kokoh guna mencipta Indonesia yang Raya. Di sini akal sejarah selalu mencatat bahwa kebesaran sebuah peradaban selalu dibangun di atas kekuatan ekonomi-politik yang sangat super karena bersumber dari kemakmuran jiwa dan badan.

Tidak ada sejarahnya, sebuah bangsa atau peradaban akan disegani dunia jika penduduknya miskin; jika warganya bodoh; jika



penghuninya culun; jika isinya cuek. Peradaban besar jika para penghuninya berpikir, berucap dan bertindak besar: makmur jiwa raganya.

Barangsiapa makmur jiwa raganya berarti makmur ruhaninya. Siapa yang makmur ruhaninya akan mentradisikan keadilan. Sebab, keadilan adalah kemakmuran yang sejati. Itu artinya, kemakmuran yang berdiri sendiri, akan selalu melanggar keadilan, dan sibuk mengembangkan ilmu serta metode untuk mengkamuflese ketidakadilan supaya tampak sebagai keadilan.

Makmur jiwa, makmur raga, makmur ruhani adalah tiga pondasi untuk mentradisikan keadilan sosial bagi seluruh semesta. Itulah ultima negara Indonesia.(\*)

*Keduabelas~*

## **TRADISI KEMAKMURAN KITA#**

Di banyak kampus dan kampung, sudah banyak sekali ilmuwan dan warga miskin yang berkata bahwa “kita tidak tahu ke mana negara ini menuju.” Sebab, apa acuannya makin tidak konsisten. Jika acuannya pasar, kita hanya pasar *segmented*. Jika acuannya konstitusi, kita hanya mengkhianati. Jika acuannya klasik (PDB, Rasio Gini, Pertumbuhan, Kemajuan dan Utang), praktis angka-angkanya tidak mengorgasmekan.

Jadi, apa sesungguhnya yang dipakai elite hari ini dalam “mengelola pemerintahan” dan menjalankan “mandat kemenangan pemilu”? Satu-satunya jawaban yang pas adalah “indeks kekuasaan diri dan segmentasinya.”

Dengan indeks itu, praktis semua sesat pikir, perbuatan setan, buta-tuli-bisu nasib warganegara, terjelaskan dengan sendirinya. Sebab seluruh hal-ikhwal perbuatannya ternyata hanya untuk diri dan kelompoknya saja.

Maka, ilustrasi yang meminjam tulisan Khalil Gibran (1883-1931) menjadi relevan bahkan penting. “Betapa kasihan, bangsa yang mengenakan pakaian tetapi tidak ditununya sendiri; memakan roti dari gandum yang tidak ia panen sendiri, dan meminum susu yang ia tidak memerasnya sendiri.

Kasihannya bangsa yang menjadikan orang dungu sebagai pahlawan dan menganggap penindasan penjajah sebagai hadiah. Kasihannya bangsa yang meremehkan nafsu dalam mimpi-mimpinya ketika tidur, sementara menyerah padanya ketika bangun.

Kasihannya bangsa yang tidak pernah angkat senjata kecuali jika sedang berjalan di atas kuburan, tidak sesumbar kecuali di reruntuhan, dan tidak memberontak kecuali ketika lehernya sudah berada di antara pedang dan landasan.

Kasihannya bangsa yang negarawannya serigala, filosofinya gentong nasi, dan senimannya tukang tambal plus tukang contek. Kasihannya bangsa yang menyambut penguasa barunya dengan terompet kehormatan, namun melepasnya dengan cacian, hanya untuk menyambut penguasa baru lain dengan terompet lagi.

Kasihannya bangsa yang orang sucinya dungu menghitung tahun-tahun berlalu; sedang orang kuatnya masih dalam gendongan. Kasihannya bangsa yang terpecah-pecah, dan masing-masing pecahan menganggap dirinya sebagai bangsa merdeka padahal dijajah.

Kasihannya bangsa yang alamnya indah, sawahnya hijau sepanjang masa, tapi banyak penjahat dan orang bodoh dan lugu dijadikan elite negara.

Kasihannya bangsa yang hasil laut, tambang dan hutannya seperti sorga di dunia tapi banyak rakyatnya menderita karena kejujuran dan keadilan telah sirna.

Kasihannya bangsa karena tempat-tempat ibadahnya penuh puja dan puji selalu menggema tetapi dibangun dari hasil korupsi, sehingga para pencuri tertawa-tawa karena mereka bebas semauanya. Kasihannya negara itu. Ya. Kasihannya warganegarannya.”

Lalu, bagaimana agar bangsa itu tak terjerumus jadi bangsat; aparatnya tak jadi keparat; pejabatnya tak jadi penjahat? Tentu tak cukup bertobat. Terlebih, pengetahuan tidaklah cukup, kita harus mengamalkannya. Niat tidaklah cukup, kita harus melakukannya.

Kita memerlukan lompatan kesadaran dan proyeksi kecerdasan di atas rata-rata. Sebab, kini siapa yang berharap bahwa demokrasi liberal membawa kesejahteraan, mereka bermimpi. Siapa yang beriman bahwa arabisme membawa keadilan, mereka berkhayal. Siapa bersikeras bahwa neoliberalisme menciptakan kemandirian, mereka sedang mabok.

Demokrasi liberal, arabisme dan neoliberalisme ini setali tiga uang: candu dan nikotin kehidupan; penyakit kaum lemah nalar; janji para durja; alat penghisapan tersempurna.

Dus, kita harus bangun. Dengan revolusi Pancasila (mental-nalar-konstitusional) yang berdentum, kita wajib menjawab problema negara maling ini dengan membuat indeks kemakmuran negara-warga yang implementasinya terukur, masif dan terstruktur.

Makmur karena sembilan kategori (kebebasan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, lapangan kerja, kesejahteraan, sosialitas, pemerataan dan kemandirian) berada pada ekuitas dan likuiditas terbaik.

Indeks kemakmuran dengan demikian adalah hitungan keadaan di mana kita mampu memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier dengan mudah. Kemakmuran berarti mendapatkan semua kebutuhan tersebut tanpa adanya tekanan; kita mampu mengatur keadaan finansial, waktu dan tenaganya; memiliki waktu untuk bersosialisasi, menjalankan hobi dan rekreasi. Jika hidup makmur maka kita akan lebih mudah dalam meraih kebahagiaan dan kesenangan hidup. Demikian pula sebaliknya.

Tetapi, indeks ini akan jadi barang mati jika kita semua tak mengimplementasikan. Sebaliknya, indeks ini akan bermakna jika kita mematerialisasikan di lapangan. Tentu ini pekerjaan raksasa. Yang hanya bisa dikerjakan oleh pemikir dan pemimpin raksasa. Siapkah kita semua mengerjakannya? Harus. Ayok kita praktekkan segera. Sebelum takdir kehancuran tiba. Sebelum kiyamat mendekat dan kita tak bisa selamat.(\*)

*Ketigabelas~*

## **INDEKS KEBAHAGIAAN#**

Siapa tak ingin bahagia? Tidak seorang pun. Maka, perjalanan kehidupan kita pada mulanya adalah keadilan. Selanjutnya kemakmuran dan dikunci dengan kemartabatan serta dipuncaki dengan (rasa dan suasana) kebahagiaan. Itulah segitiga emas cita-cita kita bernegara. Ketiganya akan membuahkan kebahagiaan.

Karena ujungnya bahagia, kini kita mengenal konsep pembangunan berbasis indeks kebahagiaan alias *index of happiness*.

Indeks ini menjadi salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kemakmuran warga negaranya. Semakin tinggi indeks kebahagiaan warganya, maka semakin makmur negara tersebut. Juga sebaliknya.

Ada sepuluh aspek untuk mengukur tingkat kebahagiaan suatu negara (warganya). Kesepuluh itu meliputi tingkat kepuasan terhadap kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan, dan kondisi keamanan.

*World Happiness Report* (WHP) yang disusun Sustainable Development Solutions Network untuk PBB pada tahun 2019, melaporkan daftar terbaru negara-negara paling bahagia di dunia untuk memperingati Hari Kebahagiaan Internasional. Di peringkat ini, Indonesia menempati urutan ke-92 dari 156 negara di dunia.

Riset indeks kebahagiaan ini didasarkan pada pertanyaan sederhana yang subjektif kepada ribuan responden di 156 negara. Methodanya menggunakan berbagai statistik untuk menjelaskan kenapa sebuah negara lebih bahagia dibanding dengan negara-negara lainnya.

Data yang dikaji antara lain termasuk kekuatan ekonomi (berdasarkan PDB per kapita), dukungan sosial, tingkat harapan hidup, kebebasan untuk memilih, kemurahan hati, dan juga persepsi tentang KKN.

Menjadi bahagia dalam bernegara Indonesia tentu kerja raksasa. Sebab, makin ke sini kita makin mengalami *distrust society*. Terutama pada segelintir orang pemerintah dan pada Pancasila sebagai ideologi bernegara. Pemerintah dan ideologi Indonesia seperti menjauhkan kita dari rasa bahagia.

Mereka juga menjauhkan kita dari kondisi sehat. Padahal sehat menurut *World Health Organization* (WHO) adalah suatu kondisi fisik, mental dan kesejahteraan sosial yang merupakan satu kesatuan dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan.

Kita sakit. Ya. Sakit yang massal. Itu semua karena munafiknya para penguasa; berbedanya kata dengan laku; lainnya teori dengan praktik dan tidak berkesesuaian antara cita-cita dengan realita.

Solusinya tentu memperbanyak pemimpin yang praktik menghidupkan Pancasila dan memulai dengan meluruskan kebijakannya antara teks dan konteks.

Jika kita punya banyak agensi Pancasila, kemungkinan segera memperoleh bahagia saat bernegara akan terwujud walau banyak rintangan. Rintang utamanya kini tentu baku hantamnya para oligarki dan kaum teokrasi. Dua model agensi yang sama jahiliyahnya, serakah, rabun konstitusi, buta sejarah dan anti intelektualisme.

Singkatnya, filosofi *the pursuit of happiness* meyakinkan kita bahwa hidup tidak selalu mudah. Hidup tidak selalu menjanjikan kenyamanan. Kadang hidup sangat keras. Apa yang terjadi tidak selalu sesuai dengan harapan dan impian.

Dalam hidup bernegara, ada saatnya kita merasa lelah, kehilangan harapan bahkan menyerah pada penjajah (asing dan lokal). Tetapi untuk meraih kemerdekaan, kesuksesan dan kebahagiaan, kita harus berani mencoba dan terus mencoba lagi sampai habis umur kita. Yakin dengan apa yang dilakukan. Pantang menyerah. Bersabar. Dan, terus berpikir positif sambil berdoa.

Selebihnya, kita harus fokus memperbaiki semua sistem pendidikan. Sebab, pendidikan adalah ornamen kemakmuran dan alat perlindungan saat warga negara mengalami kemalangan. Karenanya, semua kemalangan akan hilang dengan keadilan, sedangkan semua kemakmuran akan datang tanpa keserakahan dan penjajahan-penjarahan. Kini, mari bahagia, sukses dan ceria.(\*)

*Keempatbelas~*

## **APBN UNTUK KEMAKMURAN#**

Semua ada resikonya. Semua ada harganya. Resiko demokrasi liberal adalah mahal. Harga demokrasi liberal adalah membayar apa yang dipinta pasar. Tetapi, puncak resiko dan harga yang terjadi dalam demokrasi liberal adalah dicekik tengkulak dan rentenir internasional dan lokal.

Para tengkulak dan rentenir ini kebanyakan para pengemplang pajak. Sudah lama mereka mencuri. Via pemilu, hasil curian itu dicuci dan dilipatgandakan. Via presiden dan kabinetnya, hasil copetan yang disimpan di *negeri tax haven* akan kembali via *tax amnesty*. Negara

hanya alat bagi mereka meneguhkan perampokannya. Pemerintah yang berkuasa tetapi hanya begundalnya saja yang pesta pora.

Sesungguhnya, sejarah kekayaan konglomerasi dan oligarki di dunia adalah cerita tentang penumpukan harta dan uang gelap hasil perampokan via penjajahan yang menjarah emas, perak dan berlian negara jajahan. *Merkantilisme* tradisional seperti VOC menjadikan Belanda sebagai negara kecil kaya raya di Eropa. Elite Belanda hidup mewah di tengah penderitaan rakyat tanah jajahannya.

Begitu juga dengan penjajah Inggris, Prancis, Prusia, Spanyol dan Portugis semuanya hidup dalam kemewahan di atas penderitaan tanah dan rakyat jajahan. Harta dan uang mereka beranak-pinak sampai saat ini. Lalu, untuk menjaga hegemoni mereka, harta itu dijadikan uang pinjaman korporasi melalui jalur uang global via IMF, WB dll.

Negara miskin pinjam uang yang didapat dari merampas sumber daya alam mereka yang sudah berubah bentuk menjadi uang di pasar finansial dan dioperasionalkan oleh para bankir dan pialang uang global.

Merkantilisme ini tetap berjalan mencari mangsa baru. Lahirlah Jepang, Korea Selatan dan sekarang China yang tidak masuk dalam orbit Merkantilisme Barat di bawah pengaruh kaum Yahudi.

Di kita, para oligark penjajah berkolaborasi dengan proxy dan dikopi metodenya. Lahirlah road map bisnis konglomerasi hitam menjadi: bisnis perbankan, lalu ke bisnis tambang/sawit (ekstraktif), lanjut bisnis aset tanah/property (apartemen, hotel) masuk lagi ke rumah sakit (jualan tempat inap harian, jasa kesehatan dan alat kesehatan), lanjut ke maskapai penerbangan dan laut (tetapi intinya jualan kursi dan monopoli).

Tetapi, mereka juga mengoperasionalkan semua jenis bisnis; yang terang, setengah terang, gelap bahkan yang gelap gulita. Mereka keruk tanpa bicara moral uang itu halal atau haram. Yang ada adalah jumlah yang terus bertambah. Karena merkantilisme hanya berbicara untung dan untung.

Mereka produksi via pengaruh, bedil dan kekuasaan. Apapun jalan harus ditempuh. Halal. Tak ada yang haram. Semua itu karena para pemilik merkantilisme tidak ingin dapat saingan baru di tingkat



lokal dan internasional yang mengganggu pengaruh dan posisi mereka selama ini.

Akibat lanjutannya banyak. Saat kemiskinan ide dan harta negara kita maka inilah yang terjadi. *Pertama*, pemerintah setuju menghapus subsidi. Padahal subsidi itu perintah konstitusi. *Kedua*, pemerintah pasti naikkan pajak. Padahal pendapatan kaum miskin belum meningkat. *Ketiga*, terjadi pelemahan penegakkan hukum. Padahal negara hukum itu cita-cita konstitusional kita. *Keempat*, hutang pemerintah membunyah. Padahal, kedaulatan negara tergantung dari besar kecilnya hutang dalam dan luar negeri. *Kelima*, terjadi defisit APBN.

Lucunya, APBN kita defisit saat Indonesia eksportir babu nomor 1 di dunia, eksportir sawit nomor 1 di dunia, eksportir batubara nomor 1 di dunia, produsen nikel nomor 1 di dunia, produsen timah nomor 2 di dunia, eksportir gas nomor 3 di dunia, eksportir tembaga nomor 4 di dunia, eksportir emas nomor 5 di dunia. Hal ini bertahan terus siapapun pemenang pemilunya. Mengapa? Karena yang ada hanya pemain lama berbaju baru dan pemain baru bermental lama: limbo.

Bukankah kini kita tak lagi menikmati kuliah yang terjangkau, obat yang terbeli, listrik dan air yang nyala stabil? Bukankah kita tak mendapati para pemilik rekening di Panama Papers disuruh bayar pajak? Bukankah kita sulit melihat elite dihukum berat saat rakyat dihukum semau-maunya? Bukankah lapangan kerja makin tiada? Terjadilah tradisi defisit APBN. Dengan APBN yang defisit ini maka terlihat bahwa pemerintah tidak punya skala prioritas, tidak maksimal mencari pendapatan, tidak leluasa membuat program dan tidak mudah mengangkat PNS plus tidak bisa menghabiskan kemiskinan yang makin meluas.

Apa jalan keluarnya? Mestinya, pemerintah melakukan lima hal: 1) Nasionalisasi aset strategis; 2) Rekapitalisasi BUMN; 3) Transformasi *shadow economics* menjadi *economics state* via undang-undang; 4) Laksanakan pajak super progresif; 5) Masifikasi reindustrialisasi.

Setidaknya, publik mengenal pemain besar yang berkuasa di *shadow economic* dan menjadi pencekik presiden. Agar tak mencekik, transformasi via undang-undang adalah solusinya. Maka, jika hanya



menggunakan pendekatan neoliberal yaitu utang, utang dan utang maka pemerintah sedang menggali kubur untuk rakyatnya. Sebab yang dikerjakan hanya “besar pasak daripada tiang.”

Sebaliknya, jika hanya mengandalkan tax amnesty, sesungguhnya kita sedang gantung diri. Sebab 6.519 konglomerat yang memarkir 13.300 Triliyun sesungguhnya merupakan hasil lari dari pajak, korupsi, narkoba, illegal logging, illegal fishing, human trafficking, prostitusi yang kemarin juga mensponsori pemilu kita. Bagaimana mereka mau bayar mudah dan murah? Tidak mungkin.

Yang mungkin adalah, kita perlu revolusi ekonomi: kini dan sekarang. Sedang yang benar dan konstitusional adalah: tangkap mereka, adili dan sita kekayaannya buat negara. Apalagi pemerintah (via BIN dan KPK) punya data yang lengkap, mulai dari nama, paspor, nama perusahaan hingga nomor rekening dari para konglomerat hitam tersebut.

Kita harus berani. Jika takut maka negara ini seperti pemerintah yang tidak memerintah dan penguasa yang tidak menguasai. Negara tanpa kepala negara. Merdeka tanpa kuasa. Memenangkan pemilu untuk tunduk pada rentenir dan tengkulak saja. Dan, dapat dipastikan APBN-nya bukan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.(\*)

*Penutup~*

**MELEWATI KEMALANGAN#**

Hidup itu penuh teka-teki. Di tiap tikungan ada kode-kode. Di ujungnya sering kita temukan rahasia yang tidak tak terpecahkan. Begitulah takdir kita. Maka, rahasia kemakmuran yang ultima adalah melihat kemalangan sebagai koreksi dan bukan sebagai kegagalan.

Ya. Koreksi diri, koreksi bernegara, koreksi bersama agar lebih baik dan menyempurna. Ini sangat penting karena kemakmuran adalah prestasi yang lebih besar dari kekuasaan. Pada kekuasaan intinya adalah tentang apa yang dapat kita kontrol. Sedangkan, kemakmuran adalah tentang apa yang dapat kita bagikan. Di sini, di Indonesia kita dikutuk oleh keberlimpahan sehingga suka berbagi sampai tak tahu dirinya miskin dan paria.

Potret para paria yang miskin itu hanya jiwa kiyup tempat hidup. Tanpa prestasi, tanpa gemerlap hari. Bertahta keburukan,

beralaskan kebodohan. Tetapi, cinta mereka untuk Indonesia bak berlian utama.

Mereka itu siang malam meronda. Pagi sore meriset. Berjibaku menemukan pokok problema Indonesia dan menuliskan solusinya. Bergerak, berpikir, berucap, bertulisan untuk, demi, oleh dan atas masa depan Indonesia.

Kawan-kawan yang bijaksana. Dari kampus dan desa-desa terpencil, terlihat kini neoliberalisme yang menjarah kemakmuran kita makin gigantik. Makin ke sini, semua hal ikhwal di dunia dikomodifikasikan (dalam bisnis mutakhir). Termasuk uang, nyawa, kursi jabatan, teror, ayat suci dan kegaiban bahkan tuhan. Semua menggunakan media dan iklan yang membentuk *simulakra*. Sebuah simulakra yang melelapkan karena menghasilkan galaksi dan gugus-gugus keblingeran massal.

Selanjutnya bisnis-bisnis tersebut saling terkait karena agensinya beririsan (membentuk oligarki). Saling topang. Saling bantu walau terkadang predatori antar mereka terjadi. Di mana negara? Ia jadi alat sempurna bagi neoliberalis untuk bertelur dan beranak-pinak menjijikkan. Rakyat kembali tertimpa kemalangan. Satu takdir yang dulu ditikam mati oleh para pendiri republik.

Kini, kita harus menikam kembali. Jaringan mereka. Kurikulum mereka. Warisan-warisan mereka. Menggunakan negara. Dengan pancasila. Dan, kita lewati kebiadabannya segera. Mari bertekad. Mari berucap. Selamat datang kembali kejujuran. Selamat tinggal kembali keculasan. Agar nasib terang tak hanya di istana. Agar kegelapan tak tinggal di harga-harga. Tetapi, terang di mana-mana dan gelap milik malam saja.

Optimisme ini penting sebab sesungguhnya kita lebih berani dari yang kita duga; lebih kuat dari yang kita rasa; lebih pintar dari yang kita kira, namun itu semua tersembunyi di balik dinding tipis bernama keluguan dan keculasan para penjajah yang menjarah.

Optimisme ini sangat penting. Agar saat kita pulang ke kota-desa di Indonesia adalah pulang pada Pancasila. Pulang ke hati Indonesia adalah pulang pada akal budi luhur dan nurani sejati. Pulang ke jiwa Indonesia adalah pulang pada kejeniusan semesta, atlantis yang menusantara.

Memang, sejarah berlangsungnya sebuah negara kerap kali nampak tak berhubungan dengan gagasan awal cita-cita para pendirinya. Pencarian dan pertarungan ide-gagasan seringkali hanya diparkir di hati setelah terdesak kepentingan busuk para elitnya. Kini di republik ini sedang terjadi. Kembali terulang. Dan, kembali lagi.

Karenanya, merindukan Indonesia yang jenius dan raya adalah mengingat Ali bin Abi Thalib (599-661M) yang berkata, “jadilah seperti akar yang tak terlihat, tapi tetap menyokong kehidupan. Jadilah seperti jantung yang tak terlihat, tapi terus berdenyut setiap hari setiap saat hingga membuat kita terus hidup sampai batas waktunya berhenti—demi, untuk, oleh dan bagi semua warga Indonesia.”(\*)

***Asal Muasal Kemakmuran*** adalah buku hasil telaah serius soal peta jalan meraih kemakmuran kita sebagai negara Pancasila. Diriset secara serius dari dimensi sejarah, ide dan pertarungan gagasan yang aktual sepanjang republik ini hadir di dunia nyata.



***M. Yudhie Haryono***, teoritikus trias-ekonomika dan psiko-hermeneutika. Dua alat sempurna buat melawan kejarnya kolonialisme purba maupun penjajah modern. Menulis banyak hasil riset dalam bentuk buku yang didedikasikan buat peradaban masa depan lebih bijak, adil, martabatif, sejahtera dan mandiri. Jika tertarik, beberapa bisa didapat via e-book. Kini sedang bergiat menyempurnakan *kurikulum studi nusantara* dan mendirikan ***Universitas Nusantara*** di Bogor.